

ABSTRAK

Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) saat ini dapat mempengaruhi taraf hidup masyarakat Indonesia dikarenakan kehadiran produk UMK yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan berhasil menyokong industri ekonomi daerah hingga nasional saat ini. Bagi para pelaku UMK, memiliki legalitas halal bagi produk dan jasa yang distribusikan merupakan suatu kewajiban saat ini. Namun, ditemukan banyak pelaku UMK yang tidak berupaya untuk mendapatkan Jaminan Produk Halal (JPH) bagi produk yang diproduksi dan didistribusikan. Selain itu, ditemukan beberapa pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) di Kabupaten Pidie Jaya yang telah terdaftar didalam Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH) tidak melakukan tugasnya dalam mendampingi pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya. Permasalahannya adalah bagaimana pola komunikasi antar pribadi pendamping dalam mengurus sertifikat halal produk *self declare* dengan pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya serta hambatan komunikasi antar pribadi pendamping PPH dalam mengurus sertifikasi halal produk *self declare* dengan pelaku UMK di kabupaten Pidie Jaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pola Komunikasi antar pribadi Pendamping PPH dalam mengurus sertifikat halal produk *self declare* dengan pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya dan mendeskripsikan hambatan komunikasi antar pribadi Pendamping PPH dalam mengurus sertifikat halal produk *self declare* dengan pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penentuan informan dilakukan dengan cara purposive, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi antar pribadi pendamping PPH dalam mengurus sertifikat halal produk *self declare* dengan Pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya dibagi menjadi lima kategori. Yang dilihat dari aspek keterbukaan informasi pendamping PPH, rasa empati, dukungan, rasa positif dan kesetaraan dalam melakukan proses bimbingan dengan pelaku UMK. Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya hambatan yang kerap melanda para pendamping PPH dalam mengurus sertifikasi produk halal *self declare*. Yaitu: Gangguan mekanik, kepentingan, motivasi dan prasangka para pelaku UMK sebelum melakukan aktivitas pendampingan.

Kata kunci: Komunikasi antar pribadi, Pendamping PPH, Pelaku UMK

ABSTRACT

The development of Micro Small Medium Enterprises (MSMEs) currently influences the standard of living in Indonesian society due to the presence of MSME products that create new job opportunities and support regional to national economic industries. For MSME actors, obtaining halal certification for their products and services is now a mandatory requirement. However, it has been found that many MSME actors do not make efforts to obtain Halal Product Assurance (HPA) for their produced and distributed products. Additionally, some Halal Product Process Facilitators (PPH Facilitators) in Pidie Jaya District registered with the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) fail to fulfill their duties in assisting MSME actors in Pidie Jaya District. The issue revolves around the interpersonal communication patterns of facilitators in managing self-declared halal product certifications with MSME actors in Pidie Jaya District, as well as communication barriers among PPH facilitators in handling self-declared halal product certifications with MSME actors in Pidie Jaya District. The purpose of this research is to describe the interpersonal communication patterns of PPH facilitators in managing self-declared halal product certifications with MSME actors in Pidie Jaya District and to describe the communication barriers among PPH facilitators in managing self-declared halal product certifications with MSME actors in Pidie Jaya District. This research adopts a qualitative descriptive approach. Informant selection was purposive, and data collection techniques included observation, interviews, and document analysis.

The research findings indicate that the interpersonal communication patterns of PPH facilitators in managing self-declared halal product certifications with MSME actors in Pidie Jaya District can be categorized into five aspects: openness of information, empathy, support, positivity, and equality in guidance processes with MSME actors. During implementation, various barriers were identified that often affect PPH facilitators in managing self-declared halal product certifications, such as mechanical disruptions, conflicting interests, motivation, and prejudices among MSME actors prior to engagement.

Keywords: Interpersonal communication, PPH facilitator, MSME actors